

Edisi 22-11-2017

Kemudahan Berbisnis Belum Merata

JAKARTA –Asia Competitiveness Institute (ACI) menilai Indeks Kemudahan Berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) Index di Indonesia belum dirasakan di semua daerah. Bahkan, EoDB di Kota Jakarta juga menurun.

Research Fellow sekaligus Deputy Director ACI Mulya Amri mengatakan, dari hasil survei yang dilakukan, per sepsi pengusaha masih me rasa kan kesulitan untuk meng urus per - izinan. "Setiap daerah berbedabeda. Ada provinsi-provinsi ter - tentu yang dalam meng urus izinnya mudah, tetapi banyak provinsi lain yang masih sulit dalam mengurus izin," ujarnya di Jakarta kemarin.

Hasil survei indeks ke mudah an berbisnis yang dirilis ACI tahun ini juga mengungkap temuan bahwa DKI Jakarta menduduki peringkat keempat atau turun dua peringkat dibanding tahun 2015. Posisi Jakarta digeser oleh Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa tengah, yang masingmasing menduduki posisi pertama, kedua, dan ketiga. "Penurunan ini disebabkan performaJakartayangstagnan. Skor Jakarta pada indikator Responsiveness to Business and Competitive Policies yang terbilang rata-rata menunjukkan bahwa Jakarta masih kurang kompetitif diban ding kan dengan provinsi lain yang meng alami banyak kemajuan," kata Mulya.

Dia melanjutkan, indeks kemudahan berbisnis provinsi di Indonesia masih jauh ter - tinggal jika dibandingkan de - ngan indeks kemudahan ber - bisnis di China. "Dulu trennya China di bawah Indonesia, sekarang terbalik. Vietnam yang selama ini di bawah Indo nesia, seka - rang naik ber kem bang luar biasa dari segi indus trinya dan kemudahan ber inves tasi," tuturnya. Menurut Mulya, Indonesia perlumendorongprovinsiyang palingtinggidalamkemudahan berbisnis, seperti Jawa Timur, untuk dimak simal kan potensinya. Selain itu, perlu juga di - ting katkan kemudahan ber - bisnis di Provinsi DKI Jakarta, mengingat posisi provinsi ini sebagai benchmark perekonomi an sekaligus Ibu Kota negara Indonesia.

"Jakarta bukan hanya sebagai Ibu Kota negara, tetapi di sini berkumpulnya ekonomi makro. Jadi, harus bersaing dengan kota-kota besar di du - nia. Kalau kemudahan ber usa - ha nya lebih tinggi, tentu inves - tor akan melihat," jelasnya. Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto mengata - kan, proses perizinan bangun - an yang menjadi salah satu indikator penting kemudahan berbisnis masih bermasalah. "Hingga saat ini, belum ada inovasi yang signifikan terkait dengan proses perizinan di Jakarta. Ini salah satunya di - sebabkan oleh Dinas Pena - nam an Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai garda terdepan perizinan mempunyai banyak masalah," ujarnya.

Selain itu, kompleksnya regulasi di tingkat nasional ataupun provinsi juga men - jadi faktor penting dalam efisiensi pengurusan per - izinan. Ditam bah lagi, saat ini belum ada ke terlibatan sektor swasta dalam perumusan kebijakan. "Kompleksnya proses per - izinan di Jakarta menjadi tantangan

tersendiri bagi Pemprov DKI Jakarta dan para pelaku properti. Untuk itu, JPI sebagai mitra Pemprov DKI Jakarta berinisiatif untuk merangkul pemerintah dalam memetakan masalah per izin - an yang ada dan bersama-sama mencari solusi,” jelasnya.

Co-Director ACI Tan Kong Yam mengatakan, indeks ke - mudahan berbisnis yang dilakukan ACI ini lebih komprehensif dibandingkan indeks serupa yang dirilis Bank Dunia. Indeks ACI dihitung ber da sar - kan statistik ekonomi dan menggabungkan pandangan dari 925 pelaku bisnis di 33 provinsi. Menurut Tan, para in ves tor saat ini tengah mengamati ba - gaimana pemerintah provinsi mempermudah prosedur investasi. ”Bagi mereka, reformasi peraturan saja tidak cukup. Untuk memutuskan tujuan investasi, mereka juga mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan tenaga kerja, potensi pasar, serta efektivitas biaya. Maka, ACI memasukkan faktor-faktor tersebut dalam indeks ini,” ujarnya.

Dia melanjutkan, dalam pe - nelitiannya ACI memasukkan tiga aspek utama, yakni daya tarik bagi investor, keramahan terhadap dunia bisnis, dan kebijakan terkait daya saing.

Oktiani endarwati